



The Representation of Women in Domestic Violence News: A Corpus Linguistic Analysis

Nurul Fadzlin¹, Fauzul Asta Fiany^{2,3}, Abdul Khaliq³

nurulfadzlin2@gmail.com, astafiany2424@gmail.com, abdul.haliq@unm.ac.id

Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze how women are represented in news coverage of domestic violence (DV) on the online media platform Kompas.com, using a corpus linguistics approach. A total of 76 news articles were examined using the AntConc software, focusing on frequency, collocation, and concordance analysis of the word “perempuan” (women). The analysis reveals that although the word “women” appears fairly frequently, its representation tends to be passive and institutional. Dominant collocations such as “Komnas Perempuan” (National Commission on Violence Against Women), “violence against women,” and “women’s empowerment” indicate that women are positioned more as objects of state or institutional actions rather than as active subjects. Concordance analysis further reveals that media narratives more often depict women as victims or statistical entities rather than as agents of change. This study highlights the crucial role of media in either sustaining or challenging patriarchal ideological structures in public discourse on domestic violence. The findings underscore the need for a paradigm shift in news reporting so that women are not merely represented as victims but also as active agents in social struggle.

Keywords: Corpus Linguistics, Domestic Violence, Women's Representation

PENDAHULUAN

Dinamika kehidupan rumah tangga kerap kali menjadi ruang reproduksi berbagai bentuk relasi kekuasaan, salah satunya termanifestasi dalam kekerasan berbasis gender. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya menjadi isu domestik, tetapi juga merupakan fenomena sosial dan struktural yang dipengaruhi oleh budaya patriarki, ketimpangan gender, dan legitimasi terhadap kekuasaan laki-laki dalam ranah privat. Studi oleh Stark & Hester (2019) menyebutkan bahwa KDRT harus dipahami sebagai strategi kontrol koersif terhadap perempuan yang seringkali tersembunyi di balik relasi yang tampak normal secara sosial. Beberapa studi menyebutkan bahwa struktur sosial dan ekonomi, termasuk ketimpangan gender, berperan dalam memperkuat risiko KDRT terhadap perempuan, terutama dalam konteks rumah tangga yang dipengaruhi oleh faktor budaya dan ketidaksetaraan (Mahapatro et al., 2012).

Masalah ini tidak terbatas pada negara berkembang saja, melainkan juga terjadi di negara maju yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah lintas negara dan lintas budaya (Widyastuti, 2009). Menurut Susiana (2020), kekerasan dalam rumah tangga tampak kecil secara kasat mata, namun seringkali terdapat banyak kasus tersembunyi yang tidak dilaporkan. Pemerintah Indonesia merespons hal ini melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mencakup kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran, serta perampasan kebebasan secara paksa dalam lingkup rumah tangga (Nisa, 2018).

Sebagai konsekuensi dari kompleksitas ini, data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada 2024 menunjukkan lonjakan signifikan dalam pelaporan kasus KDRT, yaitu sebanyak 28.789 kasus, dengan perempuan sebagai korban dominan. Perbandingan dengan tahun sebelumnya yang mencatat 18.466 kasus menandakan adanya peningkatan kesadaran pelaporan, sekaligus potensi meningkatnya kekerasan itu sendiri. Di antara berbagai bentuk kekerasan, KDRT menempati posisi tertinggi berdasarkan lokasi kejadian, yang menunjukkan bahwa rumah masih menjadi tempat paling rentan bagi perempuan.

Transisi dari permasalahan KDRT sebagai fenomena sosial menuju bagaimana hal tersebut direpresentasikan dalam media menjadi penting untuk ditelusuri lebih jauh. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berdampak fisik dan psikologis terhadap korban, namun juga memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap peran gender. Di sinilah media massa berperan sebagai agen pembentuk konstruksi sosial yang sangat menentukan dalam membentuk persepsi publik terhadap perempuan korban kekerasan. Namun, media sering kali memproduksi narasi yang justru memperkuat stereotip dan ketimpangan gender. Dalam konteks Indonesia, pemberitaan mengenai KDRT masih banyak yang menyajikan perempuan dalam bingkai patriarkal yang lemah dan tidak berdaya. Kajian (Febrianti & Abrian, 2024; Tenriawali, 2018) menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam berita daring seringkali pasif, bahkan dalam beberapa kasus menyiratkan bahwa perempuan turut bertanggung jawab atas kekerasan yang menimpa mereka. Konten berita daring di media seperti detik.com banyak mengandung narasi sensasional yang lebih mengejar nilai berita daripada keadilan representasi.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Febrianti & Abrian (2024) menunjukkan bahwa perempuan digambarkan dalam peran yang lebih rendah sebagai subjek yang tidak aktif dalam laporan berita di media online detik.com. Penelitian ini menawarkan pemahaman yang signifikan mengenai representasi perempuan dalam konteks KDRT, tetapi fokus datanya hanya pada satu berita, sehingga tidak mencerminkan pola umum atau statistik bahasa yang terdapat dalam laporan KDRT. Oleh karena itu, temuan ini belum sepenuhnya menggambarkan tren pemberitaan KDRT yang semakin meningkat di media daring.

Oleh karena itu, studi ini sangat penting untuk menghadirkan wawasan yang lebih komprehensif dan unbiased mengenai cara perempuan sebagai penyintas KDRT ditampilkan dalam platform media online. Melalui pendekatan linguistik korpus, studi ini akan mengeksplorasi pola pemakaian istilah "perempuan," apakah cenderung melakukan victim-blaming atau sebaliknya memperkuat status perempuan sebagai korban. Analisis akan difokuskan pada elemen frekuensi, kolokasi, dan konkordansi. Dengan cara demikian, penelitian ini akan menyuplai pengetahuan yang lebih mendalam tentang bagaimana media membentuk cara perempuan direpresentasikan dalam laporan mengenai KDRT.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif yang didukung oleh analisis kuantitatif. Metode kualitatif dipilih karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana penggambaran perempuan dibentuk dalam berita yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Meskipun analisis ini berfokus pada penafsiran yang mendalam, penelitian ini tetap memperhatikan aspek kuantitatif yang esensial sebagai penguat argumen analisis.

Jenis penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan analisis korpus. Pilihan metode ini diambil karena fokus penelitian adalah pada pola penggunaan kata "perempuan" dalam konteks media, terutama dalam berita mengenai

kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini dilakukan melalui serangkaian langkah yang berurutan. Langkah pertama adalah mengumpulkan data berupa berita daring dari situs berita nasional Kompas.com yang mencantumkan kata “perempuan” dalam konteks KDRT. Rentang waktu yang digunakan untuk pengumpulan data adalah antara tahun 2024 hingga 2025. Semua berita yang memenuhi kriteria ini kemudian disimpan dalam format teks (.txt) untuk memastikan bahwa data tersebut dapat digunakan dengan perangkat lunak analisis korpus. Langkah berikutnya adalah pemrosesan data dengan perangkat lunak AntConc, yang digunakan untuk menganalisis frekuensi kemunculan kata “perempuan,” menemukan kolokasi yang signifikan, dan menyajikan konteks kata tersebut melalui konkordansi. Hasil dari pemrosesan ini menjadi bahan utama dalam tahap interpretasi. Langkah terakhir adalah menganalisis hasil temuan secara kualitatif dengan mengeksplorasi cara kata “perempuan” digunakan dalam berita dan bagaimana konstruksi representasi perempuan dibentuk melalui pilihan kata serta struktur kalimat yang digunakan oleh media.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berita online di Kompas.com yang menyertakan kata "perempuan" dan terkait dengan konteks kekerasan dalam rumah tangga. Kompas.com dipilih karena merupakan media nasional yang memiliki reputasi baik, menjangkau pembaca secara luas, dan secara konsisten mengangkat isu-isu sosial serta gender. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu dengan mencari berita-berita terkait di Kompas.com menggunakan kata kunci seperti “perempuan” dan “KDRT” di mesin pencari di situs tersebut. Berita yang ditemukan akan diseleksi dan disimpan dalam bentuk teks (.txt) untuk analisis selanjutnya. Proses ini dilaksanakan secara terstruktur untuk menjamin bahwa data yang digunakan dalam penelitian benar-benar sah dan relevan dengan topik penelitian. Data yang dikumpulkan sebanyak 76 berita.

Setelah mengumpulkan data, proses analisis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis korpus yang melibatkan tiga aspek utama. Aspek pertama adalah analisis frekuensi yang bertujuan untuk menentukan seberapa sering istilah "perempuan" muncul dalam berita mengenai KDRT. Aspek kedua adalah analisis kolokasi, yang berfungsi untuk mengungkap kata-kata yang secara signifikan sering muncul bersamaan dengan kata "perempuan," membentuk hubungan makna yang khas. Aspek ketiga adalah analisis konkordansi, yaitu penelaahan konteks kalimat secara menyeluruh di mana kata "perempuan" digunakan, untuk memahami cara kata tersebut dikelilingi dalam narasi. Semua hasil analisis ini kemudian diinterpretasikan secara kualitatif untuk mengungkap tren representasi perempuan dalam wacana KDRT, terutama dalam cara media menampilkan perempuan sebagai korban, pelapor, atau aktor dalam konteks kekerasan domestik. Dengan metode ini, penelitian berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang posisi perempuan dalam wacana media serta dampaknya terhadap pembentukan kesadaran publik mengenai isu gender dan kekerasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam berita kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di media daring Kompas.com cenderung menempatkan perempuan sebagai objek pasif dalam struktur wacana. Meskipun kata “perempuan” memiliki frekuensi tinggi, yaitu sebanyak 251 kali dari 76 artikel yang dianalisis, konteks kemunculannya didominasi oleh narasi institusional seperti “Komnas Perempuan”, “pemberdayaan perempuan”, dan “perlindungan perempuan”. Kolokasi ini mencerminkan posisi perempuan sebagai pihak yang dilindungi atau dibantu, bukan sebagai subjek aktif dalam pemberitaan. Analisis konkordansi juga memperlihatkan bahwa perempuan lebih sering hadir sebagai entitas yang dibicarakan oleh lembaga atau negara, alih-alih menjadi aktor yang

menyuarakan pengalaman atau melakukan aksi. Secara umum, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa media masih mereproduksi struktur wacana patriarkal, perempuan sebagai korban KDRT cenderung direpresentasikan dalam posisi subordinat dan tidak memiliki agensi penuh dalam konstruksi berita.

Pembahasan

Frekuensi

Tabel 1 Frekuensi Kata tentang Perempuan

Urutan Frekuensi	Jumlah Frekuensi	Kata
3	442	kdr
4	432	korban
7	328	kekerasan
8	285	anak
10	251	perempuan
11	251	rumah
15	228	kasus
27	130	pelaku
31	117	intan
36	112	suaminya
37	107	kami
38	106	melakukan
47	83	dilakukan
48	83	orang
49	82	kompas
50	80	mereka
52	76	mengalami
54	73	laporan
57	72	armor
58	70	komnas

Berdasarkan analisis frekuensi kata, istilah "perempuan" muncul sebanyak 251 kali dalam berita mengenai KDRT. Dalam gramatika bahasa Indonesia, "perempuan" termasuk dalam kelas kata nomina atau kata benda, yang merujuk pada individu manusia berjenis kelamin wanita. Penggunaan kata ini meliputi berbagai dimensi sosial, budaya, dan ideologis. Dalam kajian linguistik korpus, posisi kata "perempuan" sangat signifikan karena sering kali ia berfungsi sebagai subjek atau objek dalam kalimat berita. Selain itu, kata "perempuan" juga berperan penting dalam menggambarkan pelaku atau korban, serta menyoroti entitas yang menjadi fokus utama dalam teks tersebut.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "perempuan" merujuk pada manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Namun, makna kata ini telah berkembang secara konotatif dalam konteks media. Dalam berita mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), istilah ini sering muncul beriringan dengan frasa "korban kekerasan," seperti dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, serta terkait dengan lembaga atau perlindungan perempuan, misalnya Komnas Perempuan. Selain itu, istilah ini juga muncul dalam pembahasan mengenai pemberdayaan dan pelayanan perempuan. Oleh karena itu, perempuan tidak hanya diartikan sebagai identitas biologis, tetapi juga sebagai representasi sosial dan politik yang lebih luas.

Kemunculan kata "perempuan" sebanyak 251 kali mengindikasikan bahwa subjek ini memang menjadi titik fokus dalam wacana media terkait KDRT. Namun, frekuensi tinggi belum tentu menunjukkan representasi yang progresif. Menurut Fairclough (1995), kuantitas linguistik dapat memperlihatkan dominasi wacana, tetapi maknanya harus dikaji secara kontekstual untuk mengetahui apakah subjek tersebut diposisikan secara aktif atau pasif.

Dalam konteks ini, walaupun kata "perempuan" sering disebut, tidak selalu berarti perempuan diberi agensi penuh. Jika kata itu digunakan dalam struktur kalimat pasif atau sebagai objek penderita dari kekerasan, maka representasi tersebut justru mengukuhkan posisi subordinat perempuan dalam wacana media. Hal ini senada dengan kritik Wodak (1997) dalam Critical Discourse Analysis bahwa representasi leksikal harus dianalisis berdasarkan posisi dalam sintaks dan relasi semantis.

Kolokasi

Kolokasi adalah kemunculan kata secara berdekatan atau bersamaan dalam satu konteks, yang mencerminkan relasi makna yang tidak netral. Berikut 10 kolokasi utama dari kata "perempuan" dalam korpus berita KDRT.

Tabel 2 Kolokasi Kata Perempuan

No.	Urutan Frekuensi	Jumlah Frekuensi	N-Gram/Cluster
1.	61	19	komnas perempuan
2.	25	12	terhadap perempuan
3.	18	10	kekerasan terhadap perempuan
4.	18	14	pemberdayaan perempuan
5.	15	15	pelayanan perempuan
6.	11	10	seorang perempuan
7.	10	5	dan komnas perempuan
8.	8	8	kementerian pemberdayaan perempuan
9.	8	7	komisioner komnas perempuan
10.	8	7	perlindungan perempuan

Berdasarkan data yang ada, kolokasi "komnas perempuan" tercatat muncul sebanyak 19 kali. Komnas Perempuan adalah lembaga independen yang berfokus pada hak asasi perempuan dan masalah kekerasan berbasis gender. Lembaga ini berperan sebagai pelapor, advokat, dan penyedia informasi terkait kekerasan yang dialami oleh perempuan. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Fatim dkk. (2024), yang menyatakan bahwa "komnas perempuan" muncul dalam berita sebagai simbol advokasi, sekaligus menegaskan posisi perempuan sebagai korban.

Kolokasi kedua yang muncul sebanyak 12 kali adalah "terhadap perempuan," yang mencerminkan tindakan atau sikap negatif seperti kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks ini, "perempuan" diposisikan sebagai objek dari tindakan kekerasan. Frasa ini menjadi pola utama dalam narasi yang menggambarkan perempuan sebagai korban penderitaan struktural (Fatim, dkk., 2024). Selanjutnya, kolokasi "kekerasan terhadap perempuan" merujuk pada berbagai bentuk tindakan kekerasan, baik fisik, verbal, maupun psikis, yang dialami perempuan akibat identitas gender mereka. Istilah ini mendominasi laporan mengenai kekerasan dalam rumah tangga, menempatkan perempuan sebagai pusat dari isu struktural kekerasan. Dalam penelitian Jannah (2022), kolokasi "kekerasan terhadap perempuan" muncul berulang kali, berfungsi sebagai narasi yang membingkai perempuan sebagai korban utama dalam wacana feminis.

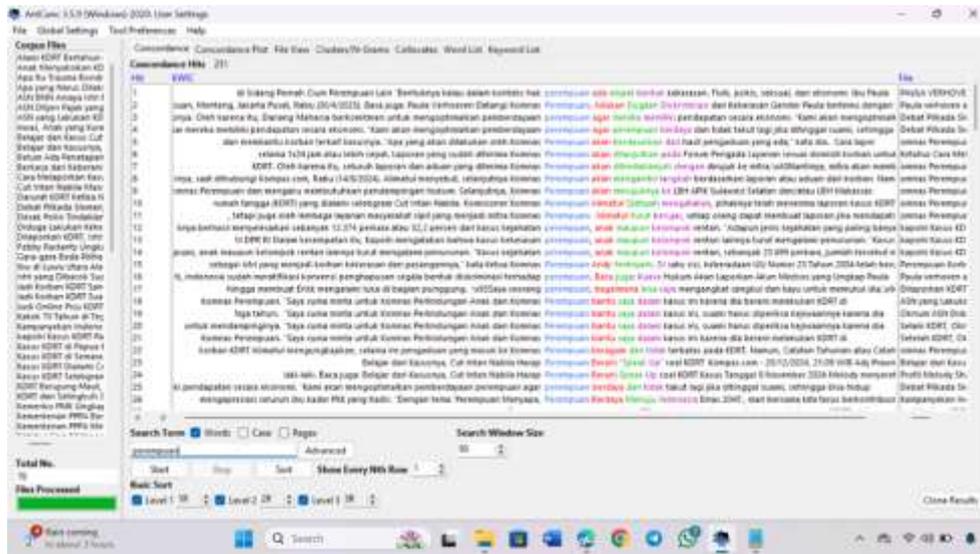
Secara harfiah, "pemberdayaan perempuan" merupakan proses meningkatkan kapasitas, kekuatan, dan agensi perempuan secara ekonomi, sosial, dan politik. Pemberdayaan Perempuan muncul dalam berita institusional atau pemerintah sebagai bentuk *counter-discourse* dari narasi kekerasan.

Kolokasi "komnas perempuan" (19 kali) dan "kekerasan terhadap perempuan" (10 kali) menunjukkan bahwa perempuan sering direpresentasikan dalam kerangka kelembagaan dan sebagai korban kekerasan struktural. Ini menciptakan narasi yang menekankan pada posisi pasif dan menunggu bantuan institusional. Seperti dijelaskan oleh (Lazar, 2017) dalam *Feminist Critical Discourse Analysis*, kolokasi semacam ini mencerminkan "wacana perlindungan" yang memperkuat hierarki gender karena perempuan diposisikan sebagai subjek yang harus dilindungi, bukan sebagai aktor transformasional.

Kolokasi lain seperti "pemberdayaan perempuan" (14 kali) terlihat lebih positif, namun tetap perlu dicermati apakah kata tersebut digunakan dalam struktur agentif atau tetap dikungkung dalam narasi *top-down* oleh negara. Jika pemberdayaan hanya hadir dalam kalimat seperti "program pemberdayaan perempuan diluncurkan oleh kementerian...", maka wacana ini tetap paternalistik bukan partisipatif.

Kolokasi "seorang perempuan" juga menunjukkan personifikasi, namun bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi memberi wajah manusia pada korban, namun di sisi lain seringkali digunakan dalam pemberitaan sensasional dan tidak jarang mengarah pada *victim-blaming* atau pengaburan konteks struktural.

Konkordansi



Gambar 1 Konkordansi Kata perempuan

Berdasarkan data di atas, analisis terhadap lima kalimat konkordansi yang mengandung kata "perempuan" mengungkapkan pola-pola representasi yang cenderung mengarah pada konstruksi pasif, institusional, dan normatif terhadap perempuan dalam wacana media mengenai KDRT. Dalam kalimat pertama, frasa "dalam konteks hak perempuan ada empat bentuk kekerasan" menggambarkan perempuan sebagai objek dalam sebuah struktur konseptual yang abstrak. Perempuan tidak dikemukakan sebagai individu, melainkan sebagai entitas normatif yang memiliki hak, tetapi tidak memiliki agensi atas hak tersebut. Temuan ini sejalan dengan studi (Fatim et al., 2024), yang menunjukkan bahwa istilah "hak perempuan" dalam berita sering digunakan untuk membingkai isu, namun tidak memberikan ruang bagi suara perempuan itu sendiri.

Kalimat kedua menyebutkan frasa "Paula Verhoeven adukan KDRT ke Komnas Perempuan," yang menempatkan sosok selebritas sebagai subjek utama, sementara istilah "perempuan" hanya digunakan sebagai nama lembaga. Ini menggambarkan praktik institusionalisasi dalam representasi perempuan, perempuan lebih banyak dibahas melalui lembaga seperti Komnas Perempuan, ketimbang dihadirkan sebagai suara individu atau kolektif. Perempuan dalam berita KDRT sering kali muncul dalam bentuk struktur administratif atau statistik, sedangkan pelaku kekerasan justru lebih banyak diwakili oleh tokoh elite atau publik.

Kalimat ketiga dan keempat menggunakan struktur pemberdayaan perempuan yang mencerminkan bentuk nominalisasi. Pada kalimat "mengoptimalkan pemberdayaan perempuan agar mereka memiliki pendapatan", perempuan tampil sebagai objek dari tindakan yang dilakukan oleh negara. Meskipun di kalimat selanjutnya perempuan digambarkan sebagai subjek yang "berdaya" dan "tidak takut ditinggal suami", posisi awalnya sebagai objek tetap menunjukkan adanya subordinasi dalam narasi yang disampaikan. Pola ini sebagai bentuk representasi pasif-struktural yang sering muncul dalam media dan lembaga negara, yang menunjukkan "kemajuan" tanpa memberikan ruang bagi suara perempuan itu sendiri. Narasi mengenai pemberdayaan perempuan sering kali tetap dibingkai dalam perspektif paternalistik, subjek utama tetaplah "kami" (negara atau pejabat), bukan "perempuan" itu sendiri.

Kalimat kelima, yaitu "Apa yang akan dilakukan oleh Komnas Perempuan akan berdasarkan dari hasil pengaduan yang ada," memperkuat peran lembaga sebagai pengganti

suara perempuan. Dalam hal ini, lembaga berfungsi sebagai subjek utama yang mengambil tindakan, sementara perempuan tetap menjadi objek data, laporan, atau entitas yang diwakili. Dalam wacana media, perempuan hampir selalu muncul melalui perantara lembaga, bukan dalam narasi pribadi atau komunitas mereka sendiri.

Secara umum, kelima kalimat tersebut menunjukkan bahwa kata “perempuan” lebih sering muncul dalam posisi sebagai objek tindakan yang dilakukan oleh negara atau institusi, ketimbang sebagai agen yang aktif dalam menyuarakan pengalaman atau mendorong perubahan. Temuan ini menguatkan kritik yang disampaikan oleh (Fairclough, 2013; Wodak, R. (1997) dalam kajian Analisis Wacana Kritis, yang menyatakan bahwa bahasa media mencerminkan struktur ideologis dominan—dalam hal ini, patriarkal dan birokratis—yang terus-menerus membingkai perempuan sebagai penerima tindakan, bukan pelaku. Dengan demikian, representasi perempuan dalam wacana media tentang KDRT tidak hanya membatasi peran mereka sebagai korban, tetapi juga menutup kesempatan untuk membingkai kembali perempuan sebagai subjek yang berperan aktif dan kritis dalam perubahan sosial.

KESIMPULAN

Bagian Penelitian ini menemukan bahwa representasi perempuan dalam berita KDRT di Kompas.com masih didominasi oleh narasi institusional dan pasif. Meskipun secara frekuensi kata “perempuan” menempati posisi tinggi, hal ini belum mencerminkan agensi atau keberdayaan dalam narasi media. Kolokasi-kolokasi utama memperlihatkan perempuan dalam relasi subordinatif terhadap lembaga negara atau sebagai korban kekerasan struktural. Analisis konkordansi menguatkan temuan ini dengan menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak tampil sebagai objek kebijakan, statistik, atau advokasi kelembagaan daripada sebagai individu dengan suara dan tindakan. Representasi semacam ini mengindikasikan bahwa media belum sepenuhnya memberikan ruang yang adil dan kritis bagi suara perempuan korban KDRT. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan pemberitaan yang lebih inklusif, reflektif, dan berbasis pada agensi korban, agar media dapat benar-benar berperan sebagai agen perubahan dalam isu-isu kesetaraan gender dan kekerasan berbasis gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Fairclough, N. (2013). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Routledge. <https://api.taylorfrancis.com/content/books/mono/download?identifierName=doi&identifierValue=10.4324/9781315834368&type=googlepdf>
- Fatim, A. L. N., Arifa, Z., Basid, A., & Lestari, S. W. (2024). Potret perempuan pada media berita daring Republika: Analisis linguistik korpus. *Suar Betang*, 19(2), Article 2.
- Febrianti, E. D., & Abrian, R. (2024). REpresentasi Perempuan sebagai Korban KDRT dalam Berita Suami Tusuk Istri di detik.com: Analisis Sara Mills. *Adibasa: Jurnal Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 1(1). <https://jurnal.asraindonesia.com/index.php/adibasa/article/view/39>
- Lazar, M. M. (2017). Feminist critical discourse analysis. In *The Routledge handbook of critical discourse studies* (pp. 372–387). Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315739342-26/feminist-critical-discourse-analysis-michelle-lazar>



- Mahapatro, M., Gupta, R. N., & Gupta, V. (2012). The Risk Factor of Domestic Violence in India. *Indian Journal of Community Medicine*, 37(3), 153. <https://doi.org/10.4103/0970-0218.99912>
- Nisa, H. (2018). Gambaran bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan penyintas. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4(2), 57–66.
- Stark, E., & Hester, M. (2019). Coercive Control: Update and Review. *Violence Against Women*, 25(1), 81–104. <https://doi.org/10.1177/1077801218816191>
- Susiana, S. (2020). Kekerasan dalam rumah tangga pada masa pandemi covid-19. *Info Singkat*, 12(24), 13–18.
- Tenriawali, A., Yusdianti Author. (2018). *Representasi korban kekerasan dalam teks berita daring Tribun Timur: Analisis wacana kritis / A. Yusdianti Tenriawali*. Universitas Indonesia Library; Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. <https://lib.ui.ac.id>
- Widyastuti, A. R. (2009). Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi. *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM*, 21(2), 395–408.
- Wodak, R. (1997). *Disorders of Discourse*. Longman. - Google Scholar. (n.d.). Retrieved May 11, 2025, from https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Wodak%2C+R.+%281997%29.+Disorders+of+Discourse.+Longman.&btnG=